

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



*Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep
Tahun 2020*

KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKJIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKJIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, 08 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2020 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, 08 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep



DINAS PENDIDIKAN
MOHAMAD IKSAN, S. Pd, MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19680716 199903 1 004

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	5
E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	6
F. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
1. Rencana Strategi.....	10
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan dan Sasaran.....	10
C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja 2020	15
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	17
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	18
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	19
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	30

BAB IV PENUTUP	31
A. Tinjauan Umum	31
B. Tinjauan Khusus	31
C. Saran Tindak Lanjut	31
Daftar Lampiran	32

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.	Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.....	11
Tabel 1.1.1	Perbandingan Antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	16
Tabel 1.2.1	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2020	17
Tabel 1.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	18
Tabel 1.5.1	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	25
Tabel 1.5.2	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	27
Tabel 1.5.3	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	28
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja

Pembangunan pendidikan, pada hakikatnya merupakan proses pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin. Atas dasar ini pemerintah selalu melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih positif, utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun ini pemerintah telah menggulirkan kurikulum baru, yakni kurikulum 2013 yang diimplementasikan sejak tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan.

Wajib belajar merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan rata-rata penduduk. Peningkatan kualitas pendidikan rata-rata penduduk berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mobilitas sosial dan mewujudkan peran sertanya secara lebih signifikan dalam pembangunan nasional.

Meningkatnya mutu pendidikan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya pembangunan pendidikan juga berarti meningkatkan kemampuan komunikasi antar penduduk. Hal ini merupakan, syarat mutlak pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah kepulauan.

Masalah pemerataan dalam memperoleh pendidikan terjadi karena perbedaan wilayah, daerah daratan dengan daerah kepulauan masih ada ketimpangan dan antara tingkat pendapatan penduduk yang menyebar di kabupaten Sumenep juga sangat beragam. Bersamaan dengan adanya otonomi sekolah, sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur semua aktifitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan

masyarakat. Dalam arti peran masyarakat sangat diperlukan dalam menurunkan anak tidak memperoleh pendidikan, sehingga pemetaraan memperoleh pendidikan khususnya di kabupaten Sumenep dapat dicapai dengan ditandai kenaikan angka partisipasi.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di kabupaten Sumenep, secara simultan terus dilakukan, menyangkut pengembangan manusia seutuhnya, yakni aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, ketrampilan, seni, olahraga dan perilaku anak didik baik di sekolah maupun diluar sekolah. Pengembangan penekanan aspek tersebut diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (life skill) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi anak didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebijakan yang menonjol kearah itu antara lain diwujudkan dalam bentuk pemahaman kurikulum tahun 2013 dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Model Kurikulum 2013 dan manajemen berbasis sekolah ini perlu dimantapkan penerapannya dengan lebih memberdayakan peran Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya, Peran Komite Sekolah dan pemberdayaan masyarakat dan orang tua peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat berperan.

Dalam rangka peningkatan mutu guru, langkah yang telah dan perlu dilanjutkan serta ditingkatkan adalah program implementasi Kurikulum 2013 dan program penyetaraan guru, terutama yang potensial dan masa tugasnya masih panjang. Sedangkan upaya peningkatan kemampuan guru adalah melalui penataran dan pelatihan. Dalam penataran dan pelatihan guru perlu ditingkatkan materi secara lebih matang dan menarik, kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk merancang suatu model dalam menjabarkan kurikulum 2013 yang lebih mengena dan bermanfaat bagi guru.

Untuk program Pendidikan Luar Sekolah, pendidikan luar biasa, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan serta manajemen pelayanan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan kearah kemandirian baik kemampuan pikir, fisik dan wawasan kemasa depan, dengan mempertahankan dan menanamkan budaya local.

B. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan

- 1) Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 71 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 41 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

Bagian Pertama : Dinas Pendidikan

Pasal 2

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan satuan pendidikan sejenis dan Pendidikan Non Formal serta ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga kependidikan);
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, program pendidikan sederajat serta Ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- d. Pembinaan dan pelaksanaan olahraga, seni serta kebudayaan bagi anak usia sekolah;
- e. Pelaksanaan pengawasan tenaga pendidik, kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, serta pendidikan sederajat;
- f. Pemberian pelayanan teknis dan administratif Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep secara struktural dibantu oleh :

Pasal 3 : (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendidikan Dasar
- c. Bidang Pendidikan Menengah
- d. Bidang Ketenagaan dan Kepengawasan
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Koordinator Pelaksana Pendidikan Kecamatan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

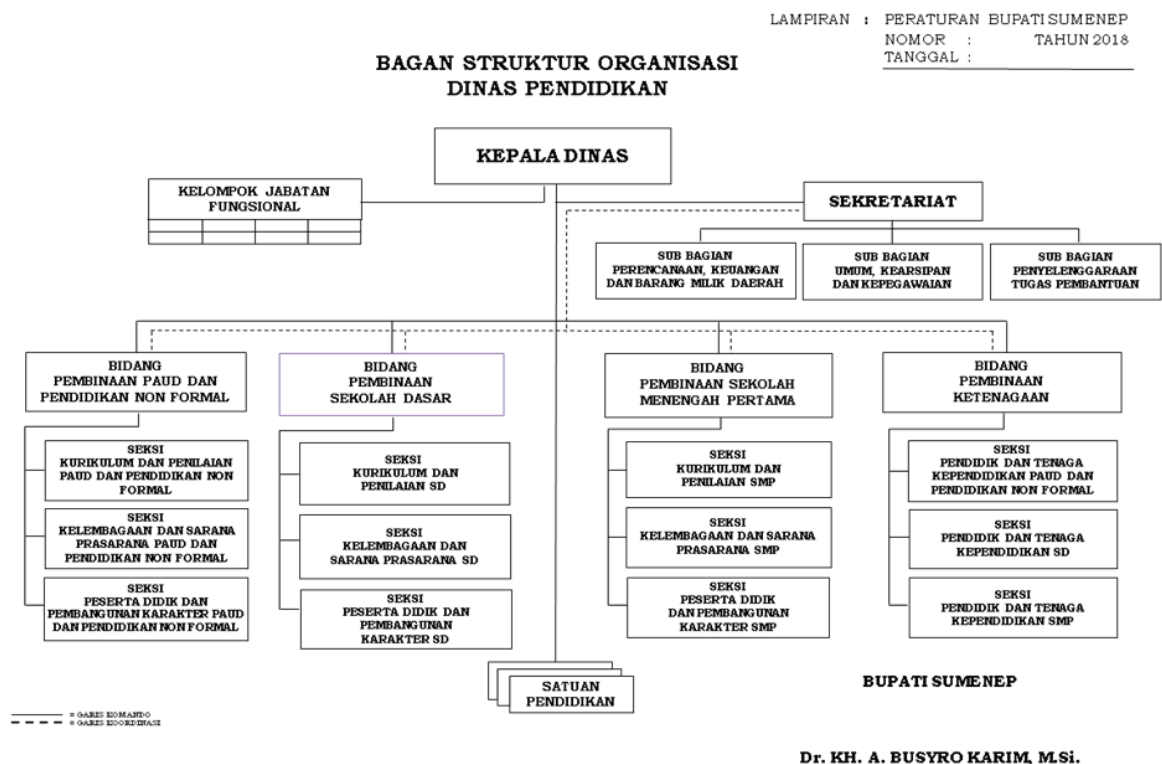
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep serta karakteristik wilayah Kabupaten Sumenep, maka wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan, lingkup Satuan Pendidikan Formal dan Informal dengan komposisi :

- 27 Koordinator Pelaksana Pendidikan Kecamatan
- 172 Sekolah Menengah Pertama
- 648 Sekolah Dasar
- SKP Batuan
- TK Pembina Kota
- TK Pembina Pragaan

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2018 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Sebagaimana struktur Dinas Pendidikan terlampir,



E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata layanan pendidikan bagi sekolah yang berkeunggulan dan berkinerja rendah
2. Peningkatan kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan SD/MI;
3. Pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan formal di jenjang SMP/MTs (lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs).
4. Menjamin keberlanjutan pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI serta SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut;
5. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu/sekolah satu atap (SMP di SD Negeri,);
6. Peningkatan prestasi nilai UN untuk SD/MI dan UN SMP, melalui peningkatan proses pembelajaran.
7. Peningkatan kualifikasi, kualitas kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs.
9. Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan revitalisasi ruang kelas pada jenjang satuan pendidikan, khususnya pada jenjang di SD/MI, SMP/MTs guna mencapai penuntasan target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
10. Pembangunan unit sekolah baru dan meningkatkan kuantitas kelembagaan dan ruang belajar SD/MI dan SMP/MTs.;
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung berpotensi pada peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas RI No.24/2007, termasuk buku ajar (referensi/pegangan), modul, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dll;
12. Pemanfaatan dan pemantapan hasil akreditasi bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
13. Terlaksananya akselerasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, terutama di ibu kota kecamatan, sekaligus menjadikannya sebagai sekolah model;
14. Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional) bagi penyandang

buta aksara usia 45 tahun lebih untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar) dan usia 15 tahun dapat menyelesaikan program keaksaraan fungsional tingkat lanjutan/mandiri.

15. Peningkatan jumlah sekolah inklusif dan PLB dalam mewujudkan perluasan layanan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
16. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama dan sinergi
17. Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang seni dan olah raga.
18. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan baik vertikal maupun horisontal;
19. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berbasis website on line system dalam penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen;
20. Peningkatan tata layanan pendidikan non formal untuk Paket A, B dan C;
21. Peningkatan kuantitas, kualitas dan penyebaran layanan pendidikan kesetaraan;
22. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan minimal memiliki atau berkualifikasi Sarjana (D IV), khususnya pada tingkat SD/MI;
23. Peningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi guru olahraga, pelatih, praktisi dan teknisi olahraga khususnya yang berstandar nasional dan propinsi;

F. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5. Program Peningkatan Informasi Pembangunan
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
8. Program Pendidikan Menengah
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13. Program Peningkatan Kualitas Siswa SD
14. Program Peningkatan Kualitas Siswa SMP

Yang mana keseluruhan program tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia telah sesuai dengan RKPD.

G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendidikan.

Sehingga untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan anak usia dini yang terdiri dari tempat penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak dan satuan pendidikan sejenis dan pendidikan non formal serta ketenagaannya (pendidik dan tenaga kependidikan);
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, program pendidikan sederajat serta ketenagaannya (pendidik dan tenaga kependidikan);
4. Pembinaan dan pelaksanaan olah raga, seni serta kebudayaan bagi anak usia sekolah;
5. Pelaksanaan pengawasan tenaga pendidik, kurikulum, penilaian, peserta didik

dan pembangunan karakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD, pendidikan non formal, pendidikan dasar, serta pendidikan sederajat;

6. Pemberian pelayanan teknis dan administratif unit pelaksana teknis pendidika;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep bergerak dan melaksanakan pelayanan bidang pendidikan berdasarkan tupoksi serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemenuhan pelayanan administrasi kantor,

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGI DINAS PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai. Visi ditetapkan atas dasar pemahaman bersama, merupakan suatu gambaran prospek masa depan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam perumusannya, Visi Kabupaten Sumenep adalah :

"Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Bapak Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Yang Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel.
5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman Dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat Serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.
6. Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Serta Nasionalisme Yang Didukung Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, termasuk pada misi pertama yaitu ***"Meningkatkan Pemerataan Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan"***.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Pemerataan Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan

2. Sasaran :

Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan

Tabel 1.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Indeks Pendidikan:	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	%	5,78
			APK tkt PAUD	%	69,23
			APK tkt SD/MI	%	129,53
			APK tkt SMP/MTS	%	122,96
			Angka Partisipasi Murni (APM):		
			APM tkt SD/MI/Paket A	%	99,79
		APM tkt SMP/MTs/Paket B	%	96,26	
		Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	%	13,75
			Angka Kelulusan		
			SD/MI	%	99,55
			SMP/MTs	%	98,92
			Angka Melanjutkan		
			SD/MI ke SMP/MTs	%	98,68
		SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	99,14	
	Angka Harapan Melk Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Meningkatnya Angka Harapan Lama Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	80,78
	Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi:	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	%	45
			Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%
		Persentase SMP/MTS yang minimal B	Angkat Putus Sekolah SD		0,45
			Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	93,40
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,44	
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	65		
Terwujudnya Sumber daya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	%	85	
		Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-5	%	98

C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya.

Strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berdasarkan Review Renstra terbaru yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Nomor : 188/1393/435.101.1/2017, yaitu :

- a. Memaksimalkan akses layanan pendidikan yang murah, merata dan terjangkau diseluruh Kabupaten Sumenep.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengupayakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.
- c. Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah Kebijakan Dinas Pendidikan.

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dan pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudannya.

Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep adalah :

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemenuhan sumber daya sesuai dengan standar.
- b. Peningkatan layanan pendidikan melalui pendidikan kualitas sumber daya yang memadai.
- c. Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

3. Prioritas Daerah

Prioritas utama dalam pembangunan pada Dinas Pendidikan terbagi menjadi beberapa program yang berimplikasi pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Adapun program pada Dinas

Pendidikan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Akses PAUD
- 2) Program Peningkatan Akses SD
- 3) Program Peningkatan Akses SMP
- 4) Program Peningkatan Akses PNF
- 5) Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- 6) Program Peningkatan Kualitas PAUD
- 7) Program Peningkatan Kualitas SD

- 8) Program Peningkatan Kualitas SMP
- 9) Program Peningkatan Kualitas PNF

4. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi**
 - 1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor
 - 4 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran
 - 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 7 Penyediaan makanan dan minuman
 - 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - 9 Peringatan Hari-Hari Besar
 - 10 Operasional UPTD
 - 11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
 - 12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas
 - 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
 - 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 15 Operasional Tugas Pembantuan
- 2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - 1 Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2 Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian
- 3 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1 Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3 Pengembangan Sistem Informasi manajemen
- 4 Program Peningkatan Akses PAUD**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)
- 5 Program Peningkatan Akses SD**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)
- 6 Program Peningkatan Akses SMP**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)
- 7 Program Peningkatan Akses PNF**
 - 1 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C
 - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)
 - 3 Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar

- 8 Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)**
 - 1 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF
 - 2 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD
 - 3 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP
 - 4 Fasilitasi Kategori II
- 9 Program Peningkatan Kualitas PAUD**
 - 1 Pengembangan Kurikulum PAUD
 - 2 BOP Penyelenggaraan PAUD
 - 3 Pembangunan Karakter peserta didik PAUD
 - 4 Fasilitasi Akreditasi PAUD
- 10 Program Peningkatan Kualitas SD**
 - 1 Bimbingan teknis Kurikulum SD
 - 2 Fasilitasi Akreditasi SD
 - 3 Olimpiade dan Festival SD
 - 4 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD
 - 5 Fasilitasi Ujian SD
 - 6 Wajib diniyah SD
 - 7 Fasilitasi SD Rujukan Mutu
 - 8 Monev sarana dan prasarana SD
 - 9 Bantuan Operasional Sekolah Dasar
- 11 Program Peningkatan Kualitas SMP**
 - 1 Bimbingan teknis Kurikulum SMP
 - 2 Fasilitasi Akreditasi SMP
 - 3 Olimpiade dan Festival SMP
 - 4 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP
 - 5 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP
 - 6 Fasilitasi Ujian SMP
 - 7 Lomba Penguatan Pendidikan Karakter
 - 8 Wajib diniyah SMP
 - 9 Fasilitasi SMP Rujukan Mutu
 - 10 Bantuan Operasional SMP
- 12 Program Peningkatan Kualitas PNF**
 - 1 Apresiasi Seni dan Pameran PNF
 - 2 Hari Aksara Internasional (HAI)
 - 3 BOP Bosda Madin
- 13 Program kualifikasi akademik PTK**
 - 1 Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD dan PNF
 - 2 Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD
 - 3 Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SMP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah dengan menetakannya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat yang dikukuhkan dalam Intruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, dengan maksud setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya didalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta segala permasalahan dan upaya pemecahannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun analisis dari capaian kinerja bidang pendidikan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target tahun 2020 dan realisasi kinerja tahun 2020
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Perbandingan antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan menghasilkan :

Tabel 1.1.1.
Perbandingan Antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi
					Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Indeks Pendidikan:	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	5,78	BPS
			Angka Partisipasi Kasar (APK) :		
			APK tkt PAUD	69,23	69,72
			APK tkt SD/MI	129,53	128,15
			APK tkt SMP/MTS	122,96	122,99
			Angka Partisipasi Murni (APM):		
			APM tkt SD/MI/Paket A	99,79	99,80
		APM tkt SMP/MTs/Paket B	96,26	99,54	
		Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	13,75	BPS
			Angka Kelulusan		
			SD/MI	99,55	99,60
			SMP/MTs	98,92	99,24
			Angka Melanjutkan		
			SD/MI ke SMP/MTs	98,68	99,95
	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	99,14	99,46		
	Angka Harapan Melk Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Meningkatnya Angka Harapan Lama Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	80,78	82,65
	Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi:	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	45	44,24
			Pesentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	97,20	97,29
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	Angkat Putus Sekolah SD	0,45	0,13
			Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	93,40	93,48
		Angka Putus Sekolah SMP	0,44	0,21	
		Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	65	62,46

	Terwujudnya Sumber daya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	85	76,81
		Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-5	98	98,72

Tabel di atas masih terdapat beberapa indikator yang kurang berhasil diantaranya Persentase APK SD, Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi dan Prosentase PTK yang mengikuti Diklat. Target tersebut diupayakan pada tahun berikutnya akan dipenuhi untuk mencapai target RPJMD.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 1.2.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Sa tu an	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Target Indikator	Realisasi	Capaian %	Target Indikator	Realisasi	Capaian %	Target Indikator	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rata-rata lama sekolah	%	5,42	BPS		6,4	BPS		5,78	BPS	
Angka Partisipasi Kasar (APK) :										
APK tkt PAUD	%	63,91	82,82	129,59	63,91	84,31	131,92	69,23	69,72	100,71
APK tkt SD/MI	%	128,79	124,21	96,44	128,79	130	100,94	129,53	128,15	98,93
APK tkt SMP/MTS	%	118,5	114,32	96,47	118,50	120,11	101,36	122,96	122,99	100,02
Angka Partisipasi Murni (APM):										
APM tkt SD/MI/Paket A	%	99,57	99,66	100,09	99,68	107,6	107,95	99,79	99,80	100,01
APM tkt SMP/MTs/Paket B	%	92,68	99,09	106,92	94,47	99,41	105,23	96,26	99,54	103,41
APM tkt SMA/SMK Paket C	%									
Harapan Lama sekolah	%	13,26	BPS		13,27	BPS		13,75	BPS	
Angka Kelulusan										
SD/MI	%	99,25	99,55	100,30	99,50	99,71	100,21	99,55	99,60	100,05
SMP/MTs	%	95,84	99,24	103,55	96,45	99,88	104,64	98,92	99,24	100,32
SMA/SMK/MA	%									
Angka Melanjutkan										
SD/MI ke SMP/MTs	%	93,1	99,95	107,36	95,3	99,98	104,91	98,68	99,95	101,29
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	96,01	96,23	100,23	97,61	97,11	99,49	99,14	99,46	100,32
Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	80,06	86,04	107,47	80	88,88	111,10	80,78	82,65	102,31
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	%	25	27,4	109,60	25	28,5	114,00	45	44,24	98,31

Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%	90,25	83,95	93,02	90,40	86,22	95,38	97,20	97,29	100,09
Angkat Putus Sekolah SD	%	0,15	0,17	113,33	0,15	0,16	106,67	0,45	0,13	28,89
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	81,3	79,25	97,48	81,50	80,21	98,42	93,40	93,48	100,09
Angka Putus Sekolah SMP	%	0,15	0,22	146,67	0,15	0,21	140,00	0,44	0,21	47,73
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	35	47	134,29	95	50	52,63	65	62,46	96,09
Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	%	75	88	117,33	80	90	112,50	85	76,81	90,36
Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	%	95	91	95,79	95	94	98,95	98	98,72	100,73

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 1.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	%	5,78	BPS	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
	APK tkt PAUD	%	69,23	69,72	100,71
	APK tkt SD/MI	%	129,53	128,15	98,93
	APK tkt SMP/MTS	%	122,96	122,99	100,02
	Angka Partisipasi Murni (APM):				
	APM tkt SD/MI/Paket A	%	99,79	99,8	100,01
APM tkt SMP/MTs/Paket B	%	96,26	99,54	103,41	
Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	%	13,75	BPS	
	Angka Kelulusan				
	SD/MI	%	99,55	99,6	100,05
	SMP/MTs	%	98,92	99,24	100,32
	Angka Melanjutkan				
	SD/MI ke SMP/MTs	%	98,68	99,95	101,29
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	99,14	99,46	100,32	

Meningkatnya Angka Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	80,78	82,65	102,31
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	%	45	44,24	98,31
Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%	97,2	97,29	100,09
	Angkat Putus Sekolah SD	%	0,45	0,13	28,89
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	93,4	93,48	100,09
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,44	0,21	47,73
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	65	62,46	96,09
Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	%	85	76,81	90,36
Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-5	%	98	98,72	100,73

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2.1 di atas sasaran tersebut didukung oleh 19 indikator sasaran. Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, target rata-rata lama sekolah tahun 2019 sebesar 6,4 % sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 5,78 %

a. Angka Partisipasi Kasar

1. Indikator Angka partisipasi kasar Paud Formal

Untuk tahun 2020 ditetapkan target sebesar 69,23% dan terealisasi sebesar 69,72% yakni sebanyak 42.900 anak usia dini dengan penduduk usia 4 - 6, maka capaian kinerjanya sebesar 100,71%.

2. Indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Pada tahun 2020 jumlah penduduk berusia 7-12 tahun sebanyak 90.328 orang dengan target yang di tetapkan 192,53% dan tercapai

98,93% dari realisasi 128,15%, hal ini di sebabkan sedikitnya anak-anak yang bersekolah di daerah pelosok dan Kepulauan khususnya jenjang SD di karenakan Kurangnya motivasi terhadap masyarakat pelosok Terhadap pentingnya pendidikan. Maka dari itu akan memberikan arahan atau sosialisasi terhadap masyarakat Pelosok dan Kepulauan melewati Koordinator Kecamatan dan pemerhati pendidikan

3. *Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs*

Jumlah siswa yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sebanyak 45.995 siswa, Dengan demikian APK Tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 122.99% dengan target yang ditetapkan sebesar 122.96% yakni mencapai 100.02% dari target.

b. Angka Partisipasi Murni

1. *Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A*

Realisasi APM untuk jenjang SD/MI tahun 2020 sebesar 99,80%, yaitu jumlah siswa SD/MI berusia 7-12 sebanyak 44.663 orang , sedangkan target yang ditetapkan sebesar 99.79% sehingga pencapaian target kinerja APM sebesar 100.01%. Atau berada diatas target, Ini dipengarui oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dan manfaat pendidikan terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat cukup tinggi

2. *Indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs*

Target APM Tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 96,26% dan terealisasi sebesar 99.54% dengan capaian 103.41. Bila dibandingkan dengan capaian APM tahun 2019 sebesar 105.23% mengalami penurunan sebesar 1,69% Hal ini disebabkan dikarenakan jumlah siswa yang bersekolah di SMP/MTs menurun diakibatkan pertumbuhan penduduk namun dalam hal capain APM tahun 2020 meningkat hal ini di dorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Dan juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) besar sekali manfaatnya, utamanya terhadap anak dari keluarga miskin dalam mengenyam pendidikannya yang lebih tinggi.

2) ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Angka Harapan Lama Sekolah di suatu daerah (Kabupaten/Kota) serta adanya akses pemerataan layanan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di masing-masing kecamatan.

Kesimpulannya Semakin besar Akses pelayanan pendidikan yang diberikan akan semakin besar angka harapan lama sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang diterima oleh masyarakat.

a. Angka Kelulusan

1. Angka Kelulusan SD/MI

Indikator ini adalah untuk menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dibanding dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Target Indikator yang ditetapkan tahun 2020 yaitu 99,55% dengan realisasi 99,60%. hal ini di dukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan Bimsus dan Try out ujian di tiap lembaga masing-masing penyelenggara pendidikan.

2. Angka Kelulusan SMP/MTs

Indikator ini adalah untuk menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dibanding dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2020 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,32% dengan target 98,92% dan terealisasi sebesar 99,24%. hal ini di dukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan Bimsus dan Try out ujian di tiap lembaga masing-masing penyelenggara pendidikan.

b. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan

1. SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa yang lulus SD/MI pada tahun 2020 sebanyak 9.833 siswa. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat SMP/MTs sebanyak 9.794 siswa atau mencapai nilai sebesar 99,95% dengan capaian kinerja sebesar 101,29% atau berada di atas target yang ditetapkan yaitu 98,68%. Hal ini disebabkan karena adanya

kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka sangat tinggi. Dan juga didukung dengan adanya Program bantuan dana BOS

2. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa yang lulus SMP/MTs pada tahun 2019 sebanyak 6.764 siswa. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 6.685 siswa atau mencapai 99,46% dari target yang di tetapkan sebesar 99,14%. maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100,32% atau berada di atas target. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka cukup tinggi.

3) MELEK HURUF

Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Target / garapan warga belajar buta huruf tahun 2020 sebanyak 80,78%, sedangkan garapan buta huruf tahun 2019 mencapai 80%, capaian kinerja tahun 2020 sebesar 102.31% dari realisasi sebesar 82,65% atau diatas target, hal ini di dukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung, didalam penyelenggaraan KBM pada kelompok belajar masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tutor sebagai katalisator, motivator dan pembimbing warga belajar. Dukungan pemerintah cukup tinggi juga dalam hal dukungan keuangan untuk pembelajaran KF (keaksaraan Fungsional) Dan dari partisipasi mayarakat terlihat dari antusiasnya untuk mengikuti proses belajar mengajar baik KF (keaksaraan Fungsional) maupun Kesetaraan, adanya semangat dan kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini secara keseluruhan dan berkesinambungan cukup tinggi. Disamping itu juga adanya kerja sama dengan Organisasi PKK Pemerintah Kabupaten, serta Darma Wanita dan juga dengan Persit Kartika candra kirana, Bayangkari, Nasyatul Aisyiah, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM disetiap kecamatan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan di kab. Sumenep, cukup baik dan lancar.

4) PERSENTA SEJUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI:

a. Persentase Lembaga Paud Terakreditasi

1. Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi

Tahun 2020 persentase lembaga PAUD terakreditasi ditargetkan 45% lembaga, namun realisasinya masih belum mencapai target yaitu 44,24%. Hal itu disebabkan selama masa pandemi Covid 19 tidak ada penilaian Akreditasi di jenjang PAUD sehingga capaian untuk Tahun 2020 mencapai 98,31% bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 yaitu 114%.

b. Persentase Lembaga SD/MI Terakreditasi

1. Prosentase lembaga SD/MI Terakreditasi Minimal B

Tahun 2020 SD yang berakreditasi Minimal B dari target 97.20%, realisasinya mencapai 97.29% yang mana capaiannya 100.09%, Dari semua sekolah SD/MI, yang mana untuk tahun 2019 dengan terealisasi sebesar 86.22 % dari target 90.40 % dengan capaian 95.38 %, hal tersebut sangat signifikan peningkatannya di tunjang dengan kegiatan Sekolah rujukan mutu dan fasilitasi Akreditasi sekolah, Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di tingkat SD

2. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah SD/MI tahun 2020 sebanyak 361 siswa dari target sebesar 0.45%. Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0,15%. Salah satu faktor yang menyebabkan putus sekolah ini adalah adanya faktor ekonomi, sulitnya transportasi dan budaya kawin muda. Bila dibandingkan dengan Angka putus sekolah tahun 2019 sebesar 0.16% dan tahun 2020 sebesar 0,13 maka terdapat penurunan angka putus sekolah, hal tersebut didorong oleh kebijakan/program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dan Program Beasiswa Siswa Miskin, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ke jenjang selanjutnya.

c. Persentase Lembaga SMP/MTs Terakreditasi

1. Prosentase lembaga SMP/MTs Terakreditasi Minimal B

Tahun 2020 SMP yang berakreditasi Minimal B dari target 93.40%, realisasinya mencapai 93.48% yang mana capaiannya 100.09%, Dari semua sekolah SMP/MTs, yang mana untuk tahun 2019 dengan terealisasi sebesar 80.21 % dari target 81.50% dengan capaian jauh

tidak sesuai dengan target yang di tetapkan untuk tahun 2019 hal tersebut sangat signifikan peningkatannya di tunjang dengan kegiatan Sekolah rujukan mutu dan fasilitasi Akreditasi sekolah, Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di tingkat SMP

2. *Angka Putus Sekolah SMP/MTs*

Jumlah siswa SMP/MTs putus sekolah tahun 2020 sebanyak 909 siswa atau mencapai kinerja 47,73%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0,15% maka capaian kinerjanya mencapai 140.00% atau berada di atas target. Kondisi yang menyebabkan anak putus sekolah secara umum adalah faktor ekonomi, sulitnya transportasi dan budaya kawin muda, namun dilapangan partisipasi masyarakat cukup tinggi terhadap pendidikan. Dan didorong oleh kebijakan/program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Beasiswa Siswa Miskin

5) PROSENTASE PTK YANG MENGIKUTI DIKLAT

Pada tahun 2020 prosentase PTK yang mengikuti diklat pada tahun yang sama. Sasaran yang ditetapkan 2020 dari target 85%, realisasinya mencapai 76,81% yang mana capaiannya 90,36. Penurunan ini sebabkan banyak kegiatan pelatihan dan diklat yang tidak dilaksanakan di karenakan pengumpulan massa tidak di perbolehkan di masa pandemi Covid 19.

6) PROSENTASE PTK YANG MEMILIKI KUALIFIKASI AKADEMIK S1 /D-4

Pada tahun 2020 persentase jumlah guru yang mempunyai kualifikasi S-1/D-IV dibandingkan dengan jumlah guru yang tidak mempunyai kualifikasi S-1/D-IV pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2020 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100.73%. Apabila dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98.99 % mengalami peningkatan secara tingkat kinerja capaian. Di lihat dari realisasi kinerja tahun 2020 mencapai 98,72% dari target yang di tetapkan 98%. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran para guru untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi sangat tinggi, hal ini didukung dengan persyaratan untuk memperoleh tunjangan sertifikasi salah satunya adanya guru minimal harus berijazah S-1 atau D-IV

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Mengukur Analisa Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dilakukan Evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 1.5.1
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran/Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	101.490.158.246,76	95,13
	Pembangunan Gedung/sarana PAUD	224.372.000,00	0,21
	Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	10.021.654.045,00	9,39
	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)	4.269.171.250,00	4,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana PNF (DAK)	428.958.000,00	0,40
	Bantuan Operasional Sekolah Dasar	59.345.505.137,16	55,63
	Bantuan Operasional SMP	15.206.232.564,60	14,25
	BOP Penyelenggaraan PAUD	42.750.000,00	0,04
	Fasilitasi Kategori II	11.951.515.250,00	11,20
	Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	4.234.815.150,00	3,97
	Pembangunan Karakter peserta didik PAUD	-	-
	Pengembangan Kurikulum	-	-
	Bimbingan teknis Kurikulum SD	22.502.000,00	0,02
	Olimpiade dan Festival SD	124.122.500,00	0,12
	Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD	8.957.500,00	0,01
	Fasilitasi Ujian SD	27.087.400,00	0,03
	Wajib diniyah SD	2.670.865.000,00	2,50

Fasilitasi SD Rujukan Mutu	150.740.000,00	0,14
Monev sarana dan prasarana SD	27.208.250,00	0,03
Bimbingan teknis Kurikulum SMP	25.000.000,00	0,02
Olimpiade dan Festival SMP	188.628.900,00	0,18
Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP	140.730.000,00	0,13
Fasilitasi Ujian SMP	95.765.100,00	0,09
Lomba Penguatan Pendidikan Karakter	15.373.000,00	0,01
Wajib diniyah SMP	489.985.000,00	0,46
Fasilitasi SMP Rujukan Mutu	242.618.000,00	0,23
Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP	5.232.500,00	0,005
Meningkatnya Angka Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	331.660.000,00	0,31
Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C	-	-
Hari Aksara Internasional (HAI)	200.000.000,00	0,19
Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar	131.660.000,00	0,12
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	-	-
Fasilitasi Akreditasi PAUD	-	-
Persentase SD/MI yang berakreditasi A	116.920.000,00	0,11
Fasilitasi Akreditasi SD	116.920.000,00	0,11
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	1.863.100,00	0,00
Fasilitasi Akreditasi SMP	1.863.100,00	0,002
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	196.362.500,00	0,18
BOP Bosda Madin	100.000.000,00	0,09

Apresiasi Seni dan Pameran PNF	96.362.500,00	0,09
Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	314.268.100,00	0,29
Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF	-	-
Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD	237.742.000,00	0,22
Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP	76.526.100,00	0,07
Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	-	-
Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD dan PNF	-	-
Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD	-	-
Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SMP	-	-
JUMLAH	106.686.047.096,76	100,00

Tabel 1.5.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Persentase Peningkatan Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	85,01%	84,57%	99,41%	106.686.047.096,76	101.088.526.971,00	95%
Program 1.1 : Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	94,00%	93,35%	99,31%	101.490.158.246,76	96.476.210.612,00	95%
Program 1.2 : Angka Rata-rata lama Sekolah	Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	97,12%	96,26%	99,11%	4.234.815.150,00	4.130.833.900,00	98%

Program 1.3 : Angka Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	Meningkatnya Angka Melek Huruf >15 Tahun s.d 55 Tahun	80,78%	82,65%	102,31%	331.660.000,00	88.928.359,00	27%
Program 1.4 : Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	68,12%	66,01%	96,90%	629.413.700,00	392.554.100,00	62%

Tabel 1.5.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Persentase Peningkatan Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	96,00%	94,75%	98,70%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran 1. Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan didukung dengan indikator sebagai berikut:

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Analisis Program dan Kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan Gedung/sarana PAUD, Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAK), Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK), Pengadaan Sarana dan Prasarana PNF (DAK), Bantuan Operasional Sekolah Dasar, Bantuan Operasional SMP, BOP Penyelenggaraan PAUD, Fasilitasi Kategori II, yang paling dominan untuk mensukseskan keberhasilan Angka Harapan Lama Sekolah adalah semua kegiatan di atas kecuali Fasilitasi Kategori II, Kesimpulannya semakin besar akses pelayanan dan mutu pendidikan di laksanakan akan semakin besar pula keberhasilan capaiannya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang akan di terima oleh masyarakat

b. Angka Rata - rata lama sekolah

Analisis Program dan Kegiatan yang dilakukan adalah didukung dengan program dan kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan karakter peserta didik dan Lomba Penguatan Pendidikan Karakter dalam rangka pembentukan karakter anak didik, Olimpiade dan Festival SD/SMP, Wajib Diniyah SD/SMP, Bimbingan Teknis Kurikulum SD/SMP, Yang mana capaiannya di atas rata-rata target yang di tetapkan, kesimpulannya semakin besar ketersediaan lembaga pendidikan akan semakin besar pula angka rata-rata lama sekolah, dan ditunjang adanya pendidikan gratis, serta bantuan Program Indonesia Pintar

c. Angka Melek Huruf > 15 Tahun s.d 55 tahun

Analisis Program dan Kegiatan yang dilakukan adalah didukung dengan program dan kegiatan yang dilakukan adalah Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C, Hari Aksara Internasional (HAI), Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar. Dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yang paling dominan dalam keberhasilan Angka melek huruf >15 tahun s.d 55 adalah Hari Aksara Internasional (HAI), kesimpulannya semakin besar kegiatan pemberantasan buta aksara yang dicapai akan semakin banyak penduduk yang mampu dan bisa baca tulis dan meleh huruf yang di dukung oleh minat warga akan pentingnya tau baca tulis dan Pendidikan

d. Persentase Jumlah Sekolah terakreditasi :

Analisis Program dan Kegiatan yang dilakukan adalah didukung dengan program dan kegiatan yang dilakukan adalah Fasilitasi Akreditasi PAUD, SD dan SMP, BOP Bosda Madin, Apresiasi Seni dan Pameran PNF, Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD dan PNF, Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD, Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SMP dan yang paling dominan untuk persentase lembaga berakreditasi dan berijin adalah Fasilitasi Akreditasi PAUD, SD dan SMP, sehingga daya saing antar lembaga penyelenggara pendidikan berjalan kompetitif dan kualitas Pendidikan semakin maju

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 didukung dengan sejumlah dana dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Alokasi dana	Realiasasi	Capaian %
1	Pendapatan	30.000.000,00	27.589.000,00	91,96
2	Belanja Tidak Langsung	549.214.112.220,04	472.353.658.719,00	86,01
3	Belanja Langsung	108.976.336.266,76	60.359.858.697,00	55,39

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan ini diperoleh dari sewa Gedung Pertemuan Ki Hajar Dewantara dan sewa perumahan Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah SD selama satu tahun anggaran 2020 (Januari s/d Desember 2020) total penerimaan, sebesar Rp 27.589.000,00 dengan nilai capaian 91,96%.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Dinas Pendidikan Kab. Sumenep. Pada tahun anggaran 2020 (Januari s/d Desember 2020), realisasi/total pengeluaran Sebesar Rp 472.353.658.719,00 dengan nilai capaian 86,01%

3. Belanja langsung

Realisasi Belanja langsung meliputi belanja program pembangunan dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2020 (Januari s/d Desember 2020) realisasi/total pengeluaran Sebesar Rp. 108.976.336.266,76 dengan nilai capaian 55,39%.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor : 41 Tahun 2016 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Dana dan Sumber Daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan rata-rata dari analisis pencapaian Kinerja dan sasaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir cukup baik, yakni : memperoleh nilai baik.

B. Tinjauan Khusus

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan ini masih belum optimal, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang kurang maksimal untuk pelaksanaannya dan bahkan sampai tidak di laksanakan sama sekali akibat dari adanya wabah Covid 19 di antaranya Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF, Pengembangan Kurikulum PAUD, BOP Penyelenggaraan PAUD, Hari Aksara Internasional (HAI) di karenakan adanya pemangkas atau *Recofusing* Covid 19. Dengan demikian diharapkan untuk semua kegiatan bisa terealisasi pada tahun anggaran 2021.

C. Saran Tindak Lanjut

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan ini masih belum optimal, masih terdapat persentase yang belum dicapai, untuk itu kami mengharap untuk tahun mendatang Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021, khususnya Kegiatan yang perlu ditingkatkan agar prosentase permasalahan diminimalkan sedemikian mungkin, untuk mencapai titik yang signifikan.

Sumenep, 08 Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP


MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT

Bembina Tk. 4

NIP. 19680716 199903 1 004

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. CARTO, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 November 2020

Pihak Kedua,


BUPATI SUMENEP
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. CARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19801216 198603 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses Pendidikan	1.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	69,23% IKU
		1.2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A	129,53% IKU
		1.3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/PAKET B	122,96% IKU
		1.4 Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun	80,78% IKU
		1.5 Persentase PTK yang mengikuti Diklat	85% IKU
		1.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,79% IKU
		1.7 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	96,26% IKU
		1.8 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	0,45% IKU
		1.9 Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	0,44% IKU
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.1 Persentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	45% IKU
		2.2 Persentase SD/MI yang berakreditasi Minimal B	97,20% IKU
		2.3 Persentase SMP yang berakreditasi Minimal B	93,40% IKU
		2.4 Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	65% IKU
		2.5 Persentase PTK yang memiliki kualifikasi	98% IKU
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB	3.1 Indeks RB	BB

No.	Program	Sebelum Perubahan Anggaran (Rp.)	Setelah Perubahan Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Rp. 3.912.122.250	Rp. 2.028.396.070,00	
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 180.000.000	Rp. -	
3	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 256.699.600	Rp. 261.893.100,00	
4	Program Peningkatan Akses PAUD	Rp. 224.372.000	Rp. 224.372.000,00	
5	Program Peningkatan Akses SD	Rp. 9.831.548.000	Rp. 10.156.654.045,00	
6	Program Peningkatan Akses SMP	Rp. 4.263.377.000	Rp. 4.512.171.250,00	
7	Program Peningkatan Akses PNF	Rp. 322.533.000	Rp. 560.618.000,00	
8	Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Rp. 13.966.726.500	Rp. 12.265.783.350,00	
9	Program Peningkatan Kualitas PAUD	Rp. 310.477.000	Rp. 42.750.000,00	
10	Program Peningkatan Kualitas SD	Rp. 47.040.479.500	Rp. 62.493.907.787,16	
11	Program Peningkatan Kualitas SMP	Rp. 14.549.910.000	Rp. 16.411.428.164,60	
12	Program Peningkatan Kualitas PNF	Rp. 1.063.898.500	Rp. 396.362.500,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 95.922.143.350	Rp. 109.354.336.267	

Sumenep, 20 November 2020



BUPATI SUMENEP
 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMENEP

Drs. CARNO, MM
 Pembina Utama/Muda
 NIP. 19601216 198603 1 011